

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI PEMODERASI
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**NUREDAH RAGILLITA UNTARY
NIM. 12030110120134**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nurendah Ragillita Untary

Nomor Induk Mahasiswa: 12030110120134

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI,**

**SISTEM PENGENDALI AN INTERN DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH DENGAN FAKTOR
EKSTERNAL SEBAGAI PEMODERASI
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAGELANG)**

Dosen Pembimbing : Moh Didik Ardiyanto, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 22 Desember 2014

Dosen Pembimbing

(Moh Didik Ardiyanto, SE.,
M.Si., Akt.)
NIP. 196606161992031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nurendah Ragillita Untary
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120134
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN FAKTOR EKSTERNAL
SEBAGAI PEMODERASI (STUDI
KASUS PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN
MAGELANG)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 11 Februari 2015

Tim Penguji

1. Moh Didik Ardiyanto, SE., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)
3. Agung Juliarto, SE., Msi., Akt, Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nurendah Ragillita Untary menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Desember 2014

Yang membuat pernyataan,

Nurendah Ragillita Untary

NIM. 12030110120134

MOTTO

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan mendapatkan pahala yang agung” (QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)

Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil sebaik baiknya dari otak yang tidak sempurna. (Muhammad SAW)

Tak ada orang di dunia ini yang menjadi miskin hanya gara-gara memberi.(Anne Frank)

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of accounting information systems, internal control systems, and human resource competencies on the quality of the region 's financial statements using the external factors as moderation.

The population in this study were all employees of the local government district of Magelang. The sample in this study was 100 respondents, namely finance and accounting staff in work units (SKPD) Magelang. Data were collected by using questionnaires and interviews.

The research proved that all independent variables accounting information systems, internal control systems, and human resource competencies have positive effects on the local government financial statements while external factors do not moderate the influence of variables accounting information systems, internal control systems and human resource competencies to the quality of local government financial statements.

Keywords : accounting information systems, internal control systems, human resources, quality of financial reports.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan menggunakan faktor eksternal sebagai moderasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang responden yaitu staf keuangan dan akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian membuktikan semua variabel independen sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata Kunci: Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkah dan limpahan rahmat-nya serta sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Reguler 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Bapak Moh Didik Ardiyanto, SE., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing atas waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahnya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Faisal, SE., Msi., Ph.D. selaku dosen wali atas bimbingan yang telah diberikan selama perkuliahan.

5. Kedua orangtua, MG Purnomo Sunu dan Emy haryati serta kakakku Diarto Pambuko dan Dwi Tesnaning atas doa restu, kasih sayang, kesabaran, dan dukungan moral serta dukungan finansial selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ramdhani Harri Pratama yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan motivasinya tanpa lelah kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terutama jurusan Akuntansi, atas ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran dan kelengkapan administrasi selama masa kuliah.
9. Sahabat tersayang Naila, Fitri, Riskia, Sabtari, Ani, Tya, Keken yang telah memberikan semangat, perhatian, gagasan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih sempurna.
10. Teman–teman KKN Desa Wonotunggal Kabupaten Batang mas ilyas, mas yudha, mas wibi, Erna, Margi, mas Nico, Bhagas, Bella, dan Sarah
11. Manja, Hida, Mita, Leni, Kiki, Yoga, Rafa, Zaki, khanif yang selalu memberikan keceriaan, semangat, dan candaan kepada penulis.
12. Teman–teman UKM Korps Sukarela PMI unit UNDIP (KSR) dan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) atas pengalaman, persahabatan, kekeluargaan dan ilmu yang telah dibagikan kepada penulis.

13. Seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk bekerjasama dalam mengisi kuesioner penelitian.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya.

Semarang, 22 Desember
2014
Penulis,

Nurendah Ragillita Untary
12030110120134

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori.....	17
3.1.1 Laporan Keuangan.....	17
2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	18
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah (LKP).....	19
2.1.4 Kualitas Informasi LKP.....	21
2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi.....	27
2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	29
2.1.7 Sistem Pengendalian Intern (SPI).....	31
2.1.8 Faktor Eksternal.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Pikir.....	39
2.4 Hubungan Logis Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	40
2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	40
2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	42
2.4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	42
2.4.4 Pengaruh Faktor Eksternal Dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian	

	Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN.....	45
3.1	Variabel Penelitian	45
4.1.1	Klasifikasi Variabel Penelitian.....	45
3.1.2	Definisi dan Pengukuran Variabel.....	45
3.1.3	Ringkasan Variabel dan Indikator Pengukuran.....	47
3.2	Populasi dan Sampel.....	49
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	50
3.3.1	Jenis Data.....	51
3.3.2	Sumber Data.....	51
3.3.3	Uji Validitas dan Reabilitas.....	52
3.4	Teknik Analisis Data.....	53
3.4.1	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.4.2	<i>Moderated Regression Analysis</i>	55
3.4.3	Pengujian Hipotesis.....	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1	Karakteristik Responden.....	58
4.1.1	Jenis Kelamin Responden.....	58
4.1.2	Umur Responden.....	59
4.1.3	Lama Bekerja.....	60
4.2	Analisis Deskripsi Variabel.....	61
4.2.1	Sistem Informasi Akuntansi.....	61
4.2.2	Sistem Pengendalian Internal	62
4.2.3	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	63
4.2.4	Faktor Eksternal.....	64
4.2.5	Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	65
4.3	Analisis Kuantitatif.....	66
4.3.1	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	66
4.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	69
4.3.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
4.3.4	Analisis Koefisien Determinasi.....	76
4.3.5	Pengujian Hipotesis.....	77
4.3.6	Pengujian Variabel Moderator dengan <i>Multiple Regression Analysis</i>	80
4.3.6.1	Pengujian Hipotesis.....	80
4.3.6.2	Pengujian Model.....	82
4.3.6.3	Analisis Koefisien Determinasi.....	83

4.4	Pembahasan.....	85
4.4.1	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	85
4.4.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	86
4.4.3	Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.....	86
4.4.4	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderator.....	86
BAB V	PENUTUP.....	89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	90
5.3	Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA.....	92
	LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu..... 38
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran..... 48
Tabel 4.1	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 58
Tabel 4.2	Umur Responden..... 59
Tabel 4.3	Lama Kerja Responden 60
Tabel 4.4	Hasil Jawaban Sistem Informasi Akuntansi..... 61
Tabel 4.5	Hasil Jawaban Sistem Pengendalian Internal..... 62
Tabel 4.6	Hasil Jawaban Kompetensi Sumber Daya Manusia.... 63
Tabel 4.7	Hasil Jawaban Faktor Eksternal..... 64
Tabel 4.8	Hasil Jawaban Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah..... 65
Tabel 4.9	Uji Validitas Indikator Variabel Sistem informasi akuntansi..... 67
Tabel 4.10	Uji Validitas Indikator Variabel Sistem Pengendalian Intern..... 67
Tabel 4.11	Uji Validitas Indikator Variabel Kompetensi SDM... 67
Tabel 4.12	Uji Validitas Indikator Variabel Faktor Eksternal..... 68
Tabel 4.13	Uji Validitas Indikator Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah..... 68
Tabel 4.14	Uji Reliabilitas Indikator Variabel..... 69
Tabel 4.15	Koefisien Pada Output Regresi..... 70
Tabel 4.16	Uji Glejser..... 72
Tabel 4.17	Uji Kolmogorov-Smirnov..... 74
Tabel 4.18	Persamaan Regresi Linier Berganda..... 75
Tabel 4.19	Koefisien Determinasi..... 76
Tabel 4.20	Hasil Uji t..... 77
Tabel 4.21	Uji F Regresi Linier Berganda..... 79
Tabel 4.22	<i>Moderated Regression Analysis</i> 80
Tabel 4.23	<i>Goodness of Fit Moderated Regression Analysis</i> 82
Tabel 4.24	Koefisien Determinasi <i>Moderated Regression Analysis</i> 83
Tabel 4.25	Hasil Hipotesis..... 84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Financial Reporting Standards-Setting Structure</i>23
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas.....	71
Gambar 4.2 Uji Normalitas.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran A	Kuesioner Penelitian.....	97
Lampiran B	Hasil olah data statistik.....	101

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Nurcholis (2011:42) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Melalui cara ini maka rentang kendali menjadi lebih pendek, koordinasi lebih mudah, dan evaluasi lebih efektif karena semua kebijakan dan pertanggungjawabannya terletak di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tetapi tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun

daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan. Stanbury, dikutip dari Mardiasmo (2006:3) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan demikian akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di atas.

Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999) dalam *Concepts Statement No.1* menyatakan tentang tujuan laporan keuangan yaitu merupakan dasar pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ronan Murphy (dalam Payanta, 2006:83) bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Kenyataan di lapangan, kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara umum masih buruk atau lemah (91% LKPD buruk, BPK, 2011), padahal pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara/daerah untuk menghasilkan informasi laporan keuangan berkualitas sesuai dengan kriteria tersebut di atas. Reformasi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peraturan perundang-undangan yang menggunakan anggaran yang tidak sedikit baik melalui anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Reformasi melalui peraturan perundang-undangan, dengan ditetapkannya beberapa peraturan diantaranya UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, Permendagri No. 21 Tahun 2011 atas perubahan kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010 dan beberapa peraturan pendukung lainnya. Reformasi tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit

jumlahnya, mulai dari biaya pembuatan, sosialisasi sampai penyediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, intinya menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun saat ini yang terjadi adalah BPK terutama daerah yang jauh dari Pulau Jawa mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit yang lazim pada beberapa pos yang disajikan pada laporan keuangan (BPK, 2012). Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat menimbulkan kerugian negara/daerah.

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas yang tercermin melalui opini auditor. Pemerintah daerah seharusnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBD setempat.

Memang tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tim audit BPK baik secara perlahan maupun secara drastis. Namun kondisi buruk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu upaya dan komitmen dari berbagai pihak dan aspek yang turut menentukan kualitas informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara konseptual ada berbagai faktor penentu kualitas pelaporan keuangan. Rezaee, (2003:26) mengemukakan enam (6) faktor yang menentukan kualitas pelaporan keuangan yaitu : *board of directors, internal auditor, audit*

committee, external auditor, top management team, governing bodies. Bauwhede (2001:1) mengemukakan bahwa potensial faktornya mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah : *Management's decisions, quality of external governance mechanisms (i.e. audit quality), quality of internal governance mechanisms (ie. quality of the board of directors), regulation as to financial repoting and external and internal governance mechanism.*

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah efektivitas pengendalian intern. Pemilihan variabel efektivitas pengendalian intern didasarkan pada salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan adalah efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya terkait dengan efektivitas SPI. Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa salah satu penyebab kualitas informasi laporan keuangan tidak meningkat karena belum berfungsi secara efektif sistem pengendalian intern (BPK, IHPS, Semester I 2012:34). Isu tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga

pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Hal tersebut terlihat dari upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan yang belum memadai sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti. (BPK, IHPS semester 1, 2012:35). Auditor internal seharusnya melakukan review secara optimal, terus-menerus sejak proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat dideteksi lebih awal dan dilakukan perbaikan sehingga saat LKPD diperiksa BPK, kesalahan-kesalahan material yang akan mempengaruhi kewajaran tidak ditemukan lagi. Fenomena belum optimalnya fungsi auditor internal mengandung arti bahwa review (pemeriksaan ulang) yang dilakukan oleh auditor internal terhadap informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK belum menyentuh permasalahan yang mendasar baik karena waktu pemeriksaan yang sangat singkat maupun karena keterbatasan (kualitas) jasa auditor internal. Dari sisi *quality control*, peran auditor internal masih terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Auditor internal belum melakukan pengawasan secara terus-menerus sejak proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Padahal keberadaan para auditor internal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

Sejak diberlakukannya Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dimana pemerintah daerah mulai melakukan pencatatan transaksi keuangan secara *double entry*. Kepmendagri 29 tahun 2002 kemudian diperbarui dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disempurnakan lagi dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Rangkaian perundangan-undangan ini telah membuat Pengelolaan Keuangan Daerah bertambah volume pekerjaan dan tingkat kerumitannya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikerjakan secara manual. Komputerisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi menjadi alternatif yang tidak dapat dihindarkan. (Paul Jhon Steinbert, 2004). Untuk mengoptimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, saat ini digunakan alat bantu teknologi informasi yaitu sistem informasi akuntansi. Dalam usahanya membenahi Sistem Informasi Akuntansi Daerah di tingkat kementriaan/lembaga dan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hasil audit untuk itu, BPK maupun lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga pemerintah harus terus berkomunikasi memastikan semua pihak terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangannya dengan meningkatkan kualitas itu adalah dengan pembangunan pusat data BPK untuk melakukan pemeriksaan berbasis elektronik atau *e-audit* dan nantinya juga akan dibangun hubungan data yang *link and match* antara lembaga-lembaga negara termasuk pemerintah dan pihak terkait pengelolaan keuangan Sehingga informasi dalam organisasi sangat penting, karena hampir disegala aspek kegiatan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kebutuhan informasi. Dimana masing-masing

pihak yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankan peranannya dengan baik apabila tersedia informasi yang tersusun secara sistematis dan terolah dengan matang (Purnomo, 2011). Sistem Informasi Akuntansi adalah menurut Kusriani dan Koniyo (2007:10), Sistem Informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai sejak perencanaan, penganggaran pendapatan dan belanja (APBD), administrasi keuangan hingga akuntansi dan pelaporan. Aplikasi sistem administrasi keuangan daerah yang baik harus mencakup semua tahapan pengelolaan keuangan daerah tersebut sehingga ada kesinambungan proses dan data.

Kesinambungan proses dan data tersebut akan menghilangkan proses input ulang data-data dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga akan mengurangi volume pekerjaan dan meningkatkan konsistensi dan kualitas data karena tidak akan terjadi kesalahan pada proses penginputan ulang data (Koniyo, 2010).

Faktor kompetensi sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan perjalanan pemerintahan daerah. Keberhasilan pemerintahan daerah lebih banyak ditentukan oleh figur pemimpinnya ketimbang faktor-faktor lainnya. Hal ini semakin membuktikan bahwa aspek *leadership* merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi pemerintahan. Namun demikian, diakui bahwa masih sulit menjumpai pemimpin yang mampu berperan sebagai *leader* dan sekaligus sebagai *manager* (administratur pemerintahan). Kemampuan sebagai *leader* dapat diperoleh melalui kharisma maupun

pengalaman, sedangkan *manager* atau administratur pemerintahan dapat diperoleh melalui pendidikan/pembelajaran. Perpaduan keduanya merupakan kondisi ideal yang diharapkan dari seorang pemimpin, karena yang bersangkutan memiliki 'talenta' sekaligus 'skill' untuk memimpin organisasinya. Sebagai *leader*, pemimpin daerah diharapkan dapat memimpin daerahnya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik yang ada, dan sebagai *manager* diharapkan dapat mensejahterakan rakyatnya melalui pemberian pelayanan publik, pembangunan daerah dan sebagainya. Untuk mendapatkan kualitas pemimpin seperti itu, tentulah diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang baik di setiap pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wriston dan Esposito (1996:36) bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan hasil audit untuk kepentingan manajemen dan prinsipal harus mendapat bantuan penuh dari manajemen organisasi, dewan komisaris, serta komite audit.

Pendapat tersebut sama dengan pendapat Bodnar dan William (2005:215) yang menyatakan bahwa meskipun auditor internal dan pihak lainnya memperhatikan struktur pengendalian intern organisasi, tanggungjawab utama terhadap struktur pengendalian intern tetaplah pada manajemen.

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan (Warisno, 2008). Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab

atau alasan kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun. Organisasi tidak dapat menghindar dari adanya pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi dan perubahan regulasi. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi (Warisno, 2008). Hal ini membuat faktor eksternal dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi yang didukung oleh penelitian Sukmaningrum dan Harto (2011).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Sukmaningrum dan Harto (2011) yang meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dengan faktor eksternal sebagai variabel pemoderasi memiliki hasil sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Yudianta dan Erawati (2012) meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitiannya adalah sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan. Sedangkan penelitian Abdallah (2013) yang meneliti tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, memiliki hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Mahaputra dan Putra (2014) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dengan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Udiyanti et al (2014) yang meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Juwita (2014) yang meneliti tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan memiliki hasil dimana standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi.

Penelitian ini memodifikasi model penelitian Sukmaningrum dan Harto (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sukmaningrum dan Harto (2011) adalah bahwa penelitian ini menambah variabel bebas yaitu sistem informasi akuntansi. Penambahan variabel ini karena dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, pelaporan keuangan daerah sudah seharusnya memanfaatkan teknologi informasi ini. Namun pemanfaatan seringkali belum dapat dilakukan secara maksimal karena belum siapnya sistem dan SDM yang memadai sehingga perlu diteliti apakah daerah sudah mengimplementasikan sistem informasi akuntansinya dengan baik.

Obyek penelitian ini adalah karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Pemilihan obyek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah karena opini audit wajar dengan pengecualian yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan wilayah industri dan wisata yang dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup signifikan sehingga pengelolaan laporan keuangan daerahnya harus dilakukan dengan akuntabel. Pelaporan ini telah dilakukan oleh Kabupaten Magelang dengan cukup baik sehingga dapat menjadi daerah percontohan bagi pemerintah daerah lainnya. Periode yang digunakan untuk penelitian ini adalah 28 November – 10 Desember 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN**

KEUANGAN DAERAH DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG)”.

1.2 Perumusan Masalah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat diperlukan bagi publik untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pemerintah daerah. Kenyataan di lapangan, kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara umum masih buruk atau lemah yaitu 91% LKPD buruk (BPK, 2011), padahal pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara/daerah untuk menghasilkan informasi laporan keuangan berkualitas sesuai dengan kriteria kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan adanya permasalahan dan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang?

4. Apakah faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang?
5. Apakah faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang?
6. Apakah faktor eksternal memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

4. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
5. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
6. Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pengaruh faktor kualitatif.
3. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh SDM, SPI, dan faktor eksternal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi

tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Halim (2008:35) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Berbeda dengan Halim, menurut Nordiawan (2006:35) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Bastian (2006) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen – dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah (LKP)

Konsep transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen, yaitu sistem perencanaan strategis, sistem pengukuran kinerja, sistem pelaporan keuangan, saluran akuntabilitas publik (*channel of publik accountability*), dan auditing sektor publik yang dapat diintegrasikan ke dalam tiga bagian akuntansi sektor publik, yaitu: Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Auditing Sektor Publik.

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan pemerintah (LKP). Pada dasarnya LKP adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun laporan keuangan pokok berbasis kas menuju akrual yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II, meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.4 Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

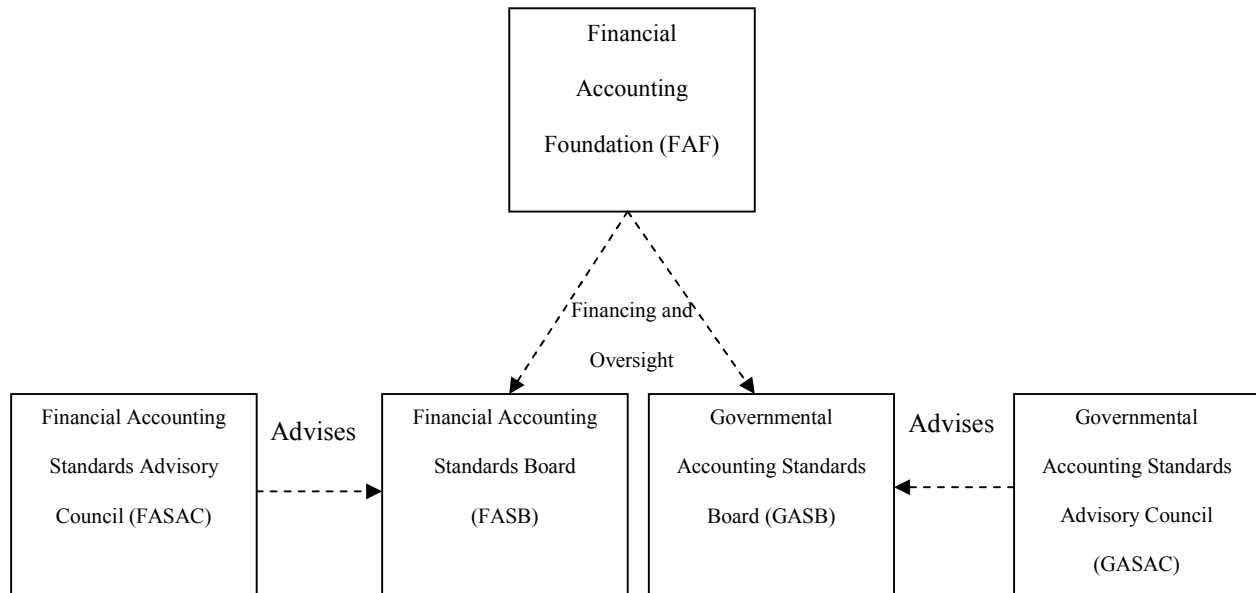
Chambers (dalam Belkoui, 2001), menyatakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah sebagai berikut:

“Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses

lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan.”

Teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*), informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan FASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman, 2008). Hal ini dapat dilihat pada gambar.

Gambar 2.1

Financial Reporting Standards-Setting Structure

Sumber : Freeman, (2008)

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. *SFAC No. 2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). *FASB* menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan

diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan *bias*, dan mewakili apa yang akan digambarkan.

Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. *FASB* menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi *investor*, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya. Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictivevalue*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

Di Indonesia sampai dengan saat ini, telah ada komite yang bekerja menyusun standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), akan tetapi yang menetapkan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah dengan Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam *SFAC No. 2*. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi dan sistem informasi sangat berkaitan erat dimana kaitan yang erat ini tercermin dalam penggunaan istilah informasi akuntansi yang menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam institusi. Akuntansi sebagai sistem informasi ekonomi dan keuangan mampu memberikan manfaat bagi pemakai, agar informasi akuntansi dapat diolah secara baik, diperlukan suatu mekanisme atau kegiatan yang baik pula. Sistem pengolahan yang baik terdiri dari prosedur, metode atau cara dan teknik yang memungkinkan data ini akan melibatkan manusia sebagai penunjang pencapaian tujuan.

Menurut Hall dalam (Thomson, 2003), sistem adalah "sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (*interrelated*) atau subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (*common purpose*)", sedangkan menurut Hansen & Mowen dalam (Fitriasari, 2000) sistem adalah "seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan yang melakukan satu atau lebih proses untuk mencapai tujuan-tujuan khusus". Menurut Mulyadi (2001) mendefinisikan sistem sebagai "sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu". Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan William (2004) adalah "*An accounting information sistem is a collection of resource, such as people and equipment, designed to transform financial and other data into information*".

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Barry E. Chusing dalam Midjan dan Susanto (2001) adalah "Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal dalam suatu organisasi yang

dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pemerosesan data keuangan”. Widjajanto (2001) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah ”Susunan berbagai fomulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen”.

Menurut pengertian diatas jelaslah apa yang dimaksud dengan sistem yang pada prinsipnya merupakan sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu input, proses dan output dimana sistem tersebut harus terorganisasi, mempunyai hubungan, berintegrasi/ berpadu dan terpusatnya tujuan-tujuan. Sumber daya input diubah menjadi sumber daya output, dimana sumber daya mengalir dari elemen input, melalui elemen transformasi ke elemen output. Suatu mekanisme pengendalian memantau proses transformasi untuk menyakinkan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuannya. Mekanisme pengendalian ini dihubungkan pada arus sumber daya dengan memakai suatu lingkaran umpan balik (*feedback loup*) yang mendapatkan informasi dari output dan menyediakan informasi bagi mekanisme pengendalian.

Pengertian sistem akuntansi secara manual menurut Mulyadi (2001) dapat didefenisikan sebagai ”organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen”, sedangkan menurut Hall dalam (Thomson 2003) sistem

informasi adalah ”sebuah serangkaian prosedur dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai”. Sistem informasi menerima output, disebut sebagai transaksi, yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi output informasi yang akan didistribusikan kepada para pemakai informasi.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Azhar, 2007). Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor

Publik, 2006). Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo dalam Kharis, 2010).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Wiley dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam

usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.1.7 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan

menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah: *“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

1. *Effectiveness and efficiency of operations*
2. *Reliability of financial reporting*
3. *Compliance with applicable laws and regulations.”*

Sedangkan definisi sistem pengendalian intern : *Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations (Petrovits et al., 2011)*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2006) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan.

Control environment (lingkungan pengendalian), menunjukkan atmosfer atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ institusi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*. *Risk assessment* (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. *Control activities* (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif. *Information and communication* (informasi dan komunikasi), sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional. *Monitoring* (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila

diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan).

2.1.8 Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan (Suprihatini, 2010). Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun.

Organisasi tidak dapat menghindari dari adanya pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi dan perubahan regulasi. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi.

Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada diluar institusi dimana perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan

mempengaruhi kinerja semua institusi dalam industri tersebut. Lingkungan eksternal terdiri dari tiga macam lingkungan yaitu (Suprihatini, 2010) :

1. Lingkungan Umum (*General Environment*)

- a. Naik turunnya perekonomian
- b. Perubahan iklim sosial dan politik
- c. Perkembangan teknologi
- d. Perubahan kebijakan pemerintah.

2. Lingkungan Industri (*Industry Environment*)

- a. Pelanggan
- b. Pesaing
- c. Pemasok.

3. Lingkungan Internasional (*Internasional Environment*)

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha institusi untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu institusi mencapai daya saing strategis (Suprihatini, 2010).

Proses yang dilakukan secara kontinyu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian (*scanning*), pengawasan (*monitoring*), peramalan (*forecasting*), dan penilaian (*assessing*) (Suprihatini, 2010).

1. Pemindaian

Melalui pemindaian institusi mengidentifikasi tanda – tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum, dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi institusi-institusi yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil.

2. Pengawasan

Melalui pengawasan institusi mendeteksi perubahan dan trend-trend lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritisal bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda.

3. Peramalan

Pada peramalan, analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi, dan seberapa cepat, perubahan-perubahan dan trend-trend itu di deteksi melalui pemindaian dan pengawasan.

4. Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan trend-trend lingkungan terhadap manajemen strategis suatu institusi. Selangkah lebih maju tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian institusi dibiarkan dengan data-data yang menarik, tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Tantriani Suknmaningrum dan Puji Harto (2011) memiliki hasil Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian I Gede Agus Yudiant dan Ni Made Adi Erawati (2012) memiliki hasil SDM, SIA dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ahmad Adel Jamil Abdallah (2013) memiliki hasil Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Rukmi Juwita (2013) memiliki hasil Standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014) memiliki hasil SDM, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ni Luh Nyoman Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) memiliki hasil Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel dan Teknik Analisis	Hasil penelitian
1	Tantriani Suknmaningrum dan Puji Harto (2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)	Variabel bebas: Kompetensi SDM Sistem pengendalian intern Variabel moderasi : Faktor eksternal Variabel terikat : Kualitas laporan keuangan Teknik analisis : Regresi berganda	Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.
2	I Gede Agus Yudiant dan Ni Made Adi Erawati (2012)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel bebas: SDM Sistem informasi akuntansi Sistem pengendalian intern Variabel terikat : Kualitas laporan keuangan Teknik analisis : Regresi berganda	SDM, SIA dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
3	Ahmad Adel Jamil Abdallah (2013)	<i>The Impact of Using Accounting Information Systems on The Quality of Financial Statement Submitted to The Income and Sales Tax Department in Jordan</i>	Variabel bebas: Sistem informasi akuntansi Variabel terikat : Kualitas laporan keuangan Teknik analisis : Regresi berganda	Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
4	Rukmi Juwita (2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel bebas: Standar akuntansi pemerintahan Sistem informasi akuntansi Variabel terikat : Kualitas laporan	Standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

			keuangan Teknik analisis : Regresi berganda	
5	I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah	Variabel bebas: SDM Sistem informasi akuntansi Sistem pengendalian intern Standar akuntansi pemerintahan Variabel terikat : Kualitas laporan keuangan Teknik analisis : Regresi berganda	SDM, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
6	Ni Luh Nyoman Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian intern dan kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng)	Variabel bebas: Standar akuntansi pemerintahan Sistem pengendalian intern SDM Variabel terikat : Kualitas laporan keuangan Teknik analisis : Regresi berganda	Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

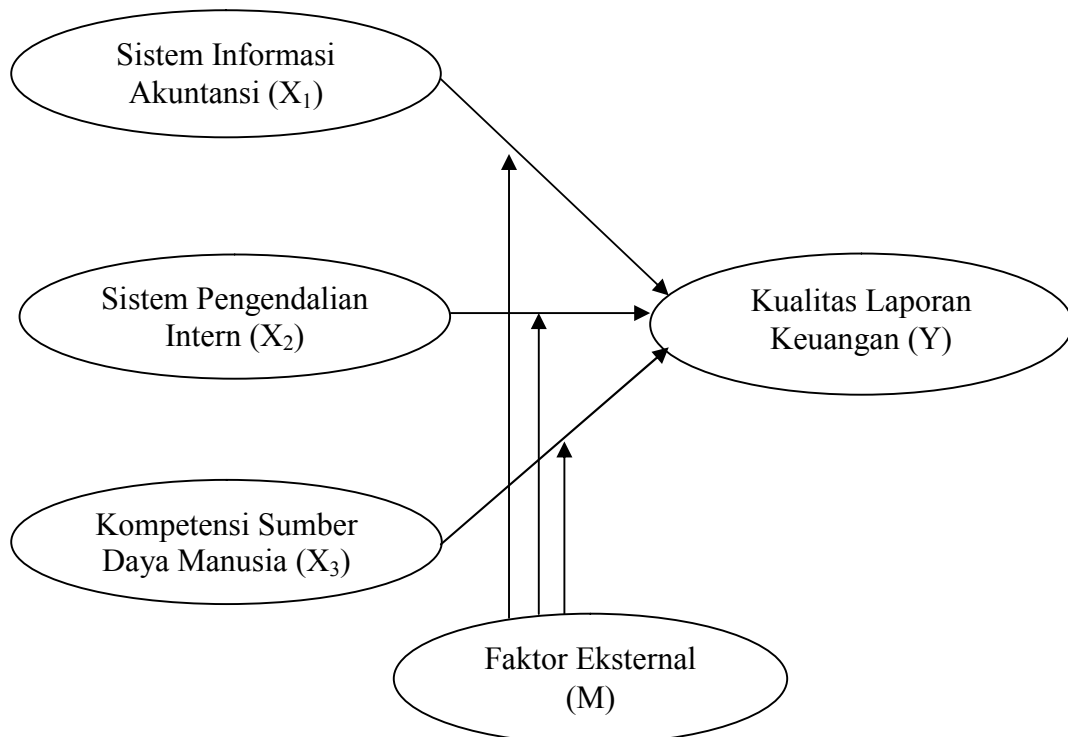
Sumber : Berbagai data sekunder, 2014

2.3 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pengaruh antara sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi. Dan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang ada, dapat dirumuskan hipotesis bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta faktor eksternal

dapat berpengaruh sebagai pemoderasi sehingga dapat digambarkan dalam skema seperti berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Yang Diolah, 2014

2.4 Hubungan Logis Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya kemajuan dalam hal teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Hal ini didukung dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyebutkan

bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

Seiring dengan perkembangan zaman tersebut maka sistem informasi akuntansi menjadi suatu cara dalam memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data yang akurat, efisien, dan terjamin keamanannya, serta sebagai alat komunikasi antar manajemen secara cepat dan terkoordinasi sehingga dapat mentransformasikan data keuangan menjadi informasi berkualitas yang dibutuhkan. Mengingat pentingnya sistem informasi akuntansi tersebut dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian yang masih berjalan dengan kurang baik membuat masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Pada hasil audit yang dilakukan oleh BPK, sering diberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengendalian intern untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini agar mendapatkan opini yang baik dan tanpa kecuali.

Sistem pengendalian intern sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai diharapkan dapat memberikan keyakinan, menjamin akurasi, keamanan, andal dan efektif serta efisien dalam kegiatan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia yang terlihat dari kemampuan dan keterampilannya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya.

Teori ini sesuai dengan penelitian Yudianta dan Erawati (2012), Mahaputra dan Putra (2014) dan Udiyanti et al (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian Sukmaningrum dan Harto (2011) yang memiliki hasil kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.4 Pengaruh Faktor Eksternal Dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor eksternal seperti perkembangan teknologi informasi yang berkembang terus menerus, dan regulasi pemerintahan yang mendukung teknologi informasi, mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas

informasi. Pemerintah melalui pejabat dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta menganalisis dampaknya pada organisasi, atau dalam kata lain, perubahan yang berasal dari luar organisasi harus diakomodasi dengan baik oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi karena dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Sukmaningrum dan Harto, 2011). Perubahan iklim sosial politik dapat pula mempengaruhi pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebab dengan perubahan kepala daerah dan DPRD, maka dapat timbul aturan-aturan baru yang berbeda dengan format lama sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Adanya perubahan regulasi juga berdampak pada seleksi yang lebih ketat pada CPNS, hal ini juga berdampak pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sukmaningrum dan Harto, 2011). Berdasarkan teori dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₅ : Faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₆ : Faktor eksternal memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan merupakan suatu yang bersifat abstrak dari gejala tersebut. Gejala ini biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dalam fakta tersebut.

3.1.1. Klasifikasi Variabel Penelitian

Berdasarkan klasifikasi variabel, maka variabel penelitian yang digunakan sebagai variabel independen adalah sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan variabel moderator dalam penelitian ini adalah faktor eksternal.

3.1.2. Definisi dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Independen

Pada penelitian ini variabel independennya adalah :

Sistem Informasi Akuntansi (X_1) adalah susunan berbagai fomulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaanya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Widjajanto, 2001). Pengukuran variable ini menggunakan skala Likert 1-5, item pertanyaan variable ini adalah 5 item dengan nomor 1-5.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X_2) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Pengukuran variable ini menggunakan skala Likert 1-5, item pertanyaan variable ini adalah 7 item dengan nomor 6-12.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3) adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Azhar, 2007). Pengukuran variable ini menggunakan skala Likert 1-5, item pertanyaan variable ini adalah 5 item dengan nomor 13-16.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah sejumlah gejala atau faktor unsur yang ada atau muncul dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel

bebas. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan pemerintah (LKP). Kualitas laporan keuangan pemerintah (LKP) adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Pengukuran variable ini menggunakan skala Likert 1-5, item pertanyaan variable ini adalah 5 item dengan nomor 21-28.

c. Variabel Moderator

Variabel moderator adalah yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini variabel moderatornya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan (Suprihatini, 2010). Pengukuran variable ini menggunakan skala Likert 1-5, item pertanyaan variable ini adalah 4 item dengan nomor 17-20.

3.1.3. Ringkasan Variabel Dan Indikator Pengukuran

Berikut ini disajikan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator yang akan digunakan untuk pembuatan kuesioner.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran

No	Nama Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber Indikator
1	Sistem Informasi Akuntansi susunan berbagai fomulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaanya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Widjajanto, 2001).	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem akuntansi sesuai SAP • Jaringan internet termanfaatkan dengan baik • Aplikasi yang digunakan • Laporan keuangan terkomputerisasi • Software sesuai dengan UU terbaru 	Skala Likert 1-5	Mahaputra dan Putra (2014)
2	Sistem Pengendalian Intern (SPI) Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas data • Ketepatan input dan posting data • Prosedur otorisasi dokumen transaksi • Tersimpannya dokumen sumber data • Pembagian tanggung jawab • Penentuan kebijakan dan standar akuntansi • Implementasi kebijakan dan standar 	Skala Likert 1-5	Sukmaningrum dan Harto (2011)
3	Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Azhar,	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman terhadap peraturan dan standar • Interaksi dengan system • Kontrol terhadap SDM • Pendidikan dan training 	Skala Likert 1-5	Sukmaningrum dan Harto (2011)

	2007).			
4	Faktor Eksternal Kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana <i>strategic</i> dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan (Suprihatini, 2010).	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan IT • Perkembangan web dan teknologi internet • Perubahan standar laporan • Perubahan regulasi pemerintah secara global 	Skala Likert 1-5	Sukmaningrum dan Harto (2011)
5	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan • Ketepatan pelaporan laporan keuangan • Kelengkapan informasi yang disajikan • Penyajian secara jujur • Isi laporan keuangan dapat diverifikasi • Keakuratan informasi yang disajikan • Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya • Kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan 	Skala Likert 1-5	Sukmaningrum dan Harto (2011)

Sumber : Berbagai data sekunder, 2014

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan / individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto Ps, dkk, 1986:95). Adapun populasi dari penelitian ini adalah karyawan pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari populasi. Untuk lebih memberikan arahan atau lebih memfokuskan pemilihan sampel yang benar-benar dapat mewakili jumlah populasi, maka digunakan

teknik pengambilan sampel dengan *proportional stratified random sampling*. *Proportional stratified random sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel dari populasi secara acak dan terstrata secara proporsional (Sugiyono, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah staf keuangan dan akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang. SKPD yang diteliti adalah 39 SKPD dengan menggunakan 100 orang responden yang merupakan staf keuangan dan akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 28 November – 10 Desember 2014 dengan cara mendatangi langsung ke instansi dan membagikan kuesioner ke instansi terkait. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu cara memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Kuesioner (pertanyaan)

Yaitu memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh para responden.

4. Kepustakaan

Yaitu memperoleh data dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

3.3.1. Jenis Data

Pada penelitian ini berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua

- a. Data kualitatif : adalah data yang tidak berbentuk angka
- b. Data kuantitatif : adalah data yang berbentuk angka

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut berupa persepsi atau tanggapan karyawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari luar data primer yang mendukung dalam penelitian.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku / literatur-literatur atau dari sumber lain yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh berupa data mengenai sejarah dan struktur organisasi atau gambaran umum perusahaan, dan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian.

3.3.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) $>$ r tabel. (Imam Ghozali, 2011)

Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig) $\leq 0,05$ dan r hitung $>$ r tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig) $\geq 0,05$ dan r hitung $<$ r tabel (Ghozali, 2011). Perhitungan validitas ini, penulis lakukan dengan menggunakan program statistik IBM SPSS 19.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai Alpha (α) $\geq 0,6$. (Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha. Dalam melakukan uji reliabilitas ini digunakan alat bantu program statistik IBM SPSS 19. Berdasarkan pengujian reliabilitas akan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tingkat besaran alpha dari

masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, maka semua variabel pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan dan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik. Pada penelitian ini digunakan alat bantu program IBM SPSS 19.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Faktor* (VIF). kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011).

Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti di atas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari unstandardized residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas $> 0,05$.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah dengan melakukan Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non parametrik.

Jika nilai signifikansi signifikan, yaitu $< 0,05$ dan $Z > 1,96$, maka data tidak terdistribusi secara normal. Data akan terdistribusi normal jika $Z > 1,96$ dan signifikansi $> 0,05$.

3.4.2. *Moderated Regression Analysis*

Analisa ini menggunakan persamaan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X_1 - X_3) dan moderasi (X_4) terhadap variabel dependen (Y). Model penelitian yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + b_4 \cdot X_4 + b_5 \cdot X_1X_4 + b_6 \cdot X_2X_4 + b_7 \cdot X_3X_4 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7$ = Koefisien regresi berganda

X_1 = Sistem informasi akuntansi

X_2 = Sistem pengendalian intern

X_3 = Kompetensi sumber daya manusia

X_4 = Faktor eksternal

e = Error

3.4.3. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel independen (X) benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2005). Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis 1,2,3, dan 4. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka Ho ditolak dan Ha diterima

2. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2011) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka Ho ditolak dan Ha diterima.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.